

**LAPORAN MBKM *By Design* FKM UNAIR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA (DP3APPKB) KOTA SURABAYA**

**PELAKSANAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI  
SMP NEGERI 59 SURABAYA**



**KARUNIA NUR FADHILLA  
102011133100**

**Divisi Biostatistika dan Kependudukan**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
SURABAYA**

**2023**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DP3APPKB) KOTA SURABAYA**

**Disusun Oleh:**  
**KARUNIA NUR FADHILLA**  
NIM. 102011133100

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing Magang MBKM  
Divisi Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.  
NIP. 196709241992032004

Pembimbing Lapangan Magang MBKM  
DP3APPKB



Ervan Dwi P. A.Md.

Koordinator Program Studi Kesehatan  
Masyarakat Program Pendidikan Sarjana



Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.  
NIP. 197311151999032002

Ketua Divisi  
Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Soenarnatalina Melaniani, Ir.,  
M.Kes.  
NIP. 196012251990032001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan MBKM by Design FKM UNAIR di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dengan judul “Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 59 Surabaya”. Laporan ini dibuat sebagai salah persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan baik. Dalam Penyusunan dan penulisan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Santi Martini dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes., selaku koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat
3. Dr. Fariani Syahrul, S.K.M., M.Kes selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan, dan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Fakultas Kesehatan Masyarakat.
4. Dr. Rr. Soenarnatalina M., Ir., M.Kes. selaku Ketua Divisi Biostatistika dan Kependudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
5. Bian Shabri Putri Irwanto, S.KM., M.KKK. selaku Koordinator MBKM by Design Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
6. Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes selaku dosen pembimbing MBKM by Design FKM UNAIR
7. Dra. Ida Widayati, M.M. selaku Kepala Dinas di DP3APPKB Surabaya
8. dr. Atiek Tri Arini, M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di DP3APPKB Surabaya
9. Ervan Dwi P. selaku pembimbing lapangan MBKM by Design FKM UNAIR di DP3APPKB
1. Rio Darmawan Jaya. S.H., Agung Hendra Saputro, S.H., dan Silvi Nur Azizah, S.E. selaku mentor kami dalam MBKM by Design
10. Para staf dan karyawan DP3APPKB Kota Surabaya
11. Keluarga tercinta, teman-teman magang, dan pihak yang mendukung serta memberikan semangat dalam proses penyusunan laporan magang ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan MBKM by Design FKM UNAIR ini berguna dan bermanfaat baik diri sendiri maupun pihak lain.

Surabaya, 20 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.2.1 Tujuan Umum .....	4
1.2.2 Tujuan Khusus .....	4
1.3 Manfaat.....	4
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	4
1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	4
1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/Dinas) .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kependudukan.....	6
2.1.1 Definisi Penduduk.....	6
2.1.2 Kependudukan.....	6
2.1.3 Masalah Kependudukan di Indonesia .....	6
2.1.4 Dampak Permasalahan Kependudukan.....	9
2.1.5 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan di Indonesia .....	9
2.2 Teori Kependudukan.....	11
2.3 Pendidikan Kependudukan.....	12
2.4 Sekolah Siaga Kependudukan.....	13
2.4.1 Definisi Sekolah Siaga Kependudukan .....	13
2.4.2 Tujuan dan Manfaat .....	14
2.4.3 Prinsip-prinsip Dasar.....	14

2.4.4 Tahapan Pembentukan .....	15
2.5 Indikator Assessment Sekolah Siaga Kependudukan .....	16
<b>BAB 3 METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Lokasi MBKM by Design FKM UNAIR .....	19
3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR.....	19
3.3 Metode Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR .....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	24
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana .....	24
4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.....	24
4.1.3 Struktur Organisasi .....	25
4.1.4 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Kota Surabaya .....	26
4.2 Pembelajaran Pencapaian Learning Outcome Mata Kuliah.....	27
4.2.1 Metodologi Penelitian .....	27
4.2.2 Seks, Gender, dan Seksualitas.....	27
4.2.3 Penilaian Kritis Kesehatan Reproduksi dan KIA.....	28
4.2.4 Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas .....	28
4.2.5 Pengantar Sistem Informasi Geografis.....	29
4.2.6 Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan.....	29
4.2.7 Komunikasi dan Pemasaran Integrasi Kesehatan .....	29
4.2.8 Teknik Sampling dan Penentuan Besar Sampel.....	30
4.2.9 Penyakit Akibat kerja.....	30
4.3 Gambaran Umum SMPN 59 Surabaya .....	30
4.4 Persiapan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya .....	31
4.5 Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya .....	31
4.6 Hambatan Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya	37
4.7 Kendala Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR .....	38

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
5.1 Kesimpulan .....	39
5.2 Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal Kegiatan MBKM by Design FKM UNAIR di DP3APPKB	17

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Struktur Organisasi DP3APPKB	22
2	Pojok Kependudukan SMP Negeri 59 Surabaya	29
3	PIK Remaja SMP Negeri 59 Surabaya	32
4	Papan Nama SSK SMP Negeri 59 Surabaya	32



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	<i>Logbook MBKM by Design FKM UNAIR</i>	38
2	Dokumentasi Pelaksanaan Assessment SSK di SMP Negeri 59 Surabaya	55
3	Dokumentasi Kegiatan Magang	56
4	Sertifikat MBKM	64
5	Lembar Assessment SSK	65
6	Surat Perintah Assessment	66
7	Surat Perintah Advokasi	67
8	Surat Pemberitahuan Sosialisasi	68

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah populasi dunia saat ini dilansir dari data UNFPA (*United Nation Population Fund*) telah mencapai lebih 8 miliar jiwa. Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduk yang menempati urutan keempat jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan sebanyak 278.696,2 juta jiwa. Namun menurut proyeksi pertumbuhan penduduk di Indonesia akan terus mengalami pertambahan. Indonesia diprediksi akan mencapai bonus demografi pada tahun 2045, dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai 70% (Mu'awwanah & Ridho Illah, 2022). Besarnya jumlah usia produktif dapat menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar tentunya akan menguntungkan dari sisi pembangunan. Namun sebaliknya, apabila Indonesia tidak mampu memanfaatkan bonus demografi berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kependudukan, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kualitas kesehatan yang rendah, dan kepadatan penduduk.

Menurut BKKBN pada Jurnal Keluarga (2018) menjelaskan penyebab ledakan penduduk dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan pernikahan usia dini. Tingginya angka kelahiran dan kasus pernikahan usia dini turut menyumbang laju pertumbuhan penduduk yang cepat yang akan berpengaruh pula terhadap kepadatan penduduk. Di samping itu, masalah-masalah kependudukan juga dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang masalah kependudukan. Menurut data Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang dikutip dari RPJMN/SKAP tahun 2017 tingkat pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan masih cukup rendah yakni sebesar 22.7%. Sementara itu pengetahuan remaja tentang isu kependudukan juga masih rendah yaitu sebesar

34.8%.

Pada dasarnya permasalahan kependudukan sangat luas sehingga dengan kondisi saat ini generasi muda harus mengerti dan paham mengenai problematik isu kependudukan. Masa remaja merupakan masa dimulainya dalam mengenal lingkungan sosial yang luas atau dikatakan juga sebagai masa peralihan dari anak menuju dewasa. Remaja seringkali dijadikan sebagai *agent of change* dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan wawasan mengenai kependudukan tidak hanya diberikan kepada orang dewasa saja, melainkan generasi muda juga harus mendapatkan pendidikan mengenai kependudukan. Semakin dini pendidikan diberikan maka kepedulian dan kesadaran mereka tentang isu kependudukan akan semakin cepat terbentuk. Generasi muda yang berkualitas mempunyai peluang sebagai penerus bangsa untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi, terbentuknya kepedulian dan kesadaran terhadap isu kependudukan berdampak pada tumbuhnya rasa tanggung jawab untuk ikut serta mencegah dan ikut serta mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kependudukan (Mukri, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, penduduk harus menjadi titik sentral. Dalam hal ini, institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) salah satunya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pasal 11 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk yang salah satunya melalui kerja sama pendidikan kependudukan.

Pemerintah Indonesia melalui BKKBN merancang pendidikan kependudukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di beberapa

jenjang pendidikan formal baik SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Adanya program Sekolah siaga kependudukan dapat mempertajam materi yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan diterapkannya SSK di sekolah-sekolah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola pendidikan dalam menjalankan program pendidikan kependudukan, KB, dan pemberdayaan keluarga. Sehingga, pengetahuan, kesadaran, serta perilaku yang berwawasan kependudukan dapat tertanam dalam remaja.

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, terdapat pojok kependudukan di dalamnya, dengan harapan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik untuk pembentukan generasi berencana (Yulianti, 2017). Namun, kondisi di lapangan dalam pelaksanaan SSK masih banyak kendala yang terjadi. Masih banyak sekolah yang belum optimal dalam melaksanakan sekolah siaga kependudukan. Abdiyah dkk (2019) menyebutkan sejak tahun 2017 hingga Agustus 2019, jumlah sekolah peserta program sekolah siaga kependudukan di Jawa Timur sebanyak 58 SMA/ sederajat dan 24 SMP/ sederajat hasilnya hanya sekitar 20,8% yang berhasil melaksanakan misinya. Para remaja masih banyak yang beranggapan bahwa materi kependudukan terlalu luas dan banyak mengandung hafalan sehingga motivasi belajar siswa kurang.

Berdasarkan data hasil asesmen yang dilakukan di 168 sekolah baik di tingkat menengah pertama maupun menengah ke atas masih banyak sekolah yang belum optimal dalam mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan ini. Target Kota Surabaya sendiri yaitu minimal sekolah dengan SSK kategori dasar sebanyak 131 sekolah. Dari 168 sekolah hanya 14 sekolah yang sudah menjadi sekolah siaga kependudukan dengan kategori paripurna dan 7 sekolah yang sudah menjadi sekolah siaga kependudukan dengan kategori dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi program SSK ini masih belum merata dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi agar cakupan program sekolah siaga kependudukan ini lebih banyak lagi.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kegiatan dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program “Sekolah Siaga Kependudukan”.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Meningkatkan pengetahuan tentang isu kependudukan bagi sekolah yang menjadi sasaran
2. Menganalisis permasalahan kependudukan di lingkungan sekolah
3. Menumbuhkan minat terhadap masalah kependudukan
4. Menumbuhkan pola hidup berwawasan kependudukan

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Manfaat kegiatan magang yang diterima oleh mahasiswa, yaitu:

1. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
2. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bersosialisasi serta bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim yang memiliki perbedaan latar belakang keilmuan, karakter, dan perilaku.

### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

Laporan kegiatan magang ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yaitu:

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sehingga mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Memperoleh informasi terkait instansi yang berhubungan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kota Surabaya
3. Mendapatkan dan menambah daftar pustaka terkait penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

### **1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/Dinas)**

Laporan magang ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagai rangkuman, informasi, masukan, bahan evaluasi, serta pertimbangan dalam menerapkan kebijakan program selanjutnya untuk kemajuan baik dari segi teknis maupun administratif sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja instansi secara efektif dan efisien.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kependudukan**

##### **2.1.1 Definisi Penduduk**

Menurut Jonny Purba penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun (BPS). Secara umum, penduduk dapat diartikan sebagai orang yang bertempat di suatu daerah atau orang yang secara hukum memiliki hak untuk tinggal di suatu daerah.

##### **2.1.2 Kependudukan**

Kependudukan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, jenis kelamin, kualitas, mobilitas dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kependudukan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, data kependudukan yang akurat dan terkini dapat membantu pemerintah dan sektor swasta dalam hal tersebut. Dalam kependudukan, setidaknya terdapat dua variabel terkait, yaitu (1) variabel demografi yang terdiri dari *fertility*, *mortality*, dan *migration*; (2) variabel non demografi yang meliputi pendidikan, pendapatan penduduk, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya.

##### **2.1.3 Masalah Kependudukan di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diproyeksikan sebanyak 278.696,2 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar juga akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah kependudukan.

Beberapa masalah kependudukan yang ada di Indonesia diantaranya:

a. Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Pertumbuhan penduduk merupakan persentase besaran perubahan jumlah penduduk dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam suatu negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pembangunan nasional. Beberapa dampak yang dapat terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu meningkatnya beban angkatan kerja dan pengangguran, menurunnya kualitas lingkungan hidup, menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kemiskinan, menurunnya kesehatan, dan lain-lain.

b. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok penduduk di suatu wilayah atau negara. Ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara lain. Menurut data BPS, ukuran ketimpangan pendapatan Indonesia adalah 0,3803 pada tahun 2019. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, ketidakpuasan, konflik dan kejahatan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dunia yang dalam penyelesaian masalahnya sulit dipecahkan. Kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan untuk hidupnya tetapi, hal tersebut bukan atas kemauannya disebut kemiskinan. Seseorang dapat dikategorikan miskin jika orang tersebut berada pada keadaan seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, rendahnya produktivitas serta rendahnya pendapatan individu tersebut (Suprianto, S, dkk. 2019). Kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara lain. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau setara dengan 9,78 persen dari total penduduk. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan manusia, menurunkan kualitas hidup, dan menimbulkan berbagai masalah sosial.



c. **Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata**

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Kepadatan penduduk Indonesia mencapai 142 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah 1,92 km<sup>2</sup> dan total penduduk 272,68 juta jiwa pada akhir 2021. Menurut data BPS, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 857 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan, kepadatan penduduk Kota Surabaya sendiri tahun 2022 mencapai 8.633 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk yang tidak merata dapat diakibatkan dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata pula yang bersifat monoton hanya berkembang di beberapa wilayah saja. Perkembangan ekonomi harus bersifat merata agar penduduk tidak berlomba-lomba untuk pindah ke suatu daerah seperti kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum sempurna. Untuk mencari pekerjaan, banyak pemuda dari desa yang merantau ke kota-kota besar dan bahkan ada yang sampai menetap di sana. Hal ini dapat membuat populasi kota-kota besar semakin padat. Semakin tinggi kepadatan penduduk maka tantangan yang akan dihadapi juga harus lebih diperhatikan. Kepadatan penduduk yang terjadi di suatu wilayah dapat menjadi penyebab naiknya angka kriminalitas yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang padat dan permasalahan kesejahteraan kebutuhan pangan yang kurang (Edwart dan Azhar, 2019). Banyaknya masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk dapat menjadi faktor penghambat berkembangnya kualitas penduduk di daerah tersebut.

d. **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah**

Tingkat kemampuan dan keterampilan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan disebut sebagai kualitas sumber daya manusia. SDM Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia sebesar 0,7185 pada tahun 2019, menurut data BPS. Pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan harapan hidup adalah tiga komponen utama IPM, yang merupakan ukuran kualitas hidup penduduk. Pertumbuhan ekonomi, daya saing global, inovasi, dan kreativitas dapat dihambat oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah.

#### **2.1.4 Dampak Permasalahan Kependudukan**

Permasalahan kependudukan yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak secara signifikan baik terhadap kehidupan individu, masyarakat, maupun negara. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya permasalahan kependudukan antara lain:

- a. Dampak Sosial: Masalah kependudukan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Masalah kependudukan yang tidak dapat diatasi dengan baik dapat menyebabkan kekurangan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
- b. Dampak ekonomi: Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi perekonomian negara, terutama jika tidak diiringi dengan adanya peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Masalah kependudukan juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi di antara wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang berbeda.
- c. Dampak lingkungan: Masalah kependudukan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, terutama jika tidak diiringi dengan adanya pengelolaan sumber daya alam yang tepat. Jumlah penduduk yang meningkat dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- d. Dampak politik: Isu kependudukan dapat mempengaruhi stabilitas politik, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ketidakpuasan masyarakat dan kemungkinan aksi protes dapat muncul sebagai akibat dari masalah kependudukan yang tidak teratasi dengan baik.

#### **2.1.5 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan di Indonesia**

Dalam mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya yang meliputi:

- a. Program Keluarga Berencana (KB): Dalam upaya mengontrol

pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an. Selain menyediakan informasi dan layanan terkait keluarga berencana, program ini menawarkan akses mengenai berbagai metode pelaksanaan KB yang aman dan efektif.

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi: Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran, pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk perawatan kontrasepsi.
- c. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan: Pendidikan merupakan modal penting bagi seseorang. Selain peningkatan akses pendidikan yang bertujuan agar bisa merata, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya dalam ini mengenai kependudukan. Salah satu upaya yang dilakukan sudah tercermin dalam program Sekolah Siaga Kependudukan. Program ini mengintegrasikan mata pelajaran dengan materi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai kependudukan bagi para remaja sedini mungkin. Sehingga, intervensi-intervensi yang akan diberikan nanti lebih mudah untuk diimplementasikan jika sejak dini sudah memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai keadaan kependudukan beserta permasalahannya.
- d. Peningkatan kesempatan kerja: Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sektor industri baru dan meningkatkan investasi. Selain itu, untuk mengatasi masalah kependudukan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan program pemberdayaan perempuan, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dasar, dan meningkatkan kualitas perawatan maternal dan neonatal.

## 2.2 Teori Kependudukan

Pada awalnya dalam teori kependudukan membahas mengenai hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumber alam atau pangan (penduduk optimum) dan hubungan antara penduduk dan lingkungan (*carrying capacity*/daya dukung). Seiring berjalannya waktu, teori-teori kependudukan berkembang dikarenakan kekhawatiran atas kesengsaraan yang dapat timbul dari kemiskinan.

Ada banyak teori mengenai kependudukan, salah satunya yaitu teori Malthus yang merupakan teori kependudukan paling dikenal. Teori Malthus (1766-1834). Malthus mengajukan tiga proposisi besar. Pertama, penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi/pangan. Kedua, penduduk dengan sendirinya akan meningkat kalau sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali kalau ada penghambat. Ketiga, penghambat tersebut, dan penghambat yang menekan kekuatan perkembangan penduduk, serta penahan dampaknya pada tingkat subsistensi, semuanya dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan, dan kesengsaraan.

Kemudian, Malthus mengajukan teori kelebihan penduduk (*over population theory*). Teori Malthus menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung.

Malthus berpendapat bahwa terdapat dua cara untuk dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk, yaitu *preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *positive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan).

Meskipun demikian teori mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makana dapat berjalan
- b. Kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian
- c. Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah

- d. Fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan (Skousen, 2005).

### **2.3 Pendidikan Kependudukan**

Menurut Abu Ahmadi (2016) pendidikan kependudukan merupakan salah satu usaha dalam bidang pendidikan yang memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam hal kependudukan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan hidup di masa mendatang. Tujuan BKKBN mengimplementasikan pendidikan kependudukan yaitu untuk menciptakan generasi muda yang paham akan kependudukan, masalah, maupun isu-isu kependudukan khususnya di Indonesia. Sehingga, pendidikan kependudukan ini merupakan salah satu proses pembentukan pengetahuan dan upaya membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan kependudukan yang bermanfaat di masa depan. Dalam infografis pendidikan kependudukan (2017), BKKBN menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu:

- a. Jalur Formal

Pada jalur formal memiliki ruang lingkup, yaitu SD-MI, SMP-Mts, SMA-MA, dan perguruan tinggi. Melalui jalur formal, program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) diterapkan. Di tingkat sekolah, beberapa program pendidikan seperti gemar membaca, pelatihan guru, bimbingan konseling, pojok kependudukan, dan lainnya. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, kegiatan yang dilakukan dapat disisipkan melalui kegiatan kemahasiswaan, kegiatan perkuliahan, kegiatan penelitian, dan juga ada pojok kependudukan.

- b. Jalur NonFormal

Pendidikan kependudukan pada jalur non formal diterapkan melalui materi pelajaran yang didapatkan dari diklat. Ruang lingkup pendidikan kependudukan pada jalur non formal di Balai Diklat Pemerintah dan Swasta

- c. Jalur Informal

Berbeda dengan jalur non formal, pendidikan kependudukan jalur

informal dilakukan melalui pendekatan di lingkungan sekitar, mulai dari kegiatan keluarga atau kegiatan di kelompok masyarakat. Ruang lingkup pendidikan kependudukan diterapkan pada pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok masyarakat (poktan), serta melalui media massa.

## **2.4 Sekolah Siaga Kependudukan**

### **2.4.1 Definisi Sekolah Siaga Kependudukan**

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mempelajari kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Selain itu, penerapan pendidikan kependudukan di berbagai aktivitas siswa dan bimbingan konseling didukung oleh Pojok (*Population Corner*) sebagai sumber dan bacaan pendidikan siswa sebagai upaya untuk membangun karakter generasi berencana.

Pada dasarnya dalam program SSK, materi kependudukan dengan mata pelajaran hanya diintegrasikan tidak ada penambahan mata pelajaran baru maupun menambah jam pelajaran. Sehingga, tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan. Pengintegrasian ini justru mempertajam materi yang dibahas, dan program SSK menjadi wadah bagi program-program yang digulirkan BKKBN seperti PIK Remaja, Genre (*Genre Goes to School*), dan lain-lain. Sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan. Dalam program SSK juga memusatkan pembelajaran kepada para siswa. Siswa-siswa memiliki kesempatan untuk lebih memperdalam materi kependudukan yang didukung dengan materi dan media yang berkaitan dengan kependudukan. Contohnya seperti penyediaan buku dan pojok kependudukan. Adanya pojok kependudukan bertujuan sebagai salah satu sumber informasi mengenai kependudukan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman para siswa mengenai materi kependudukan.

#### **2.4.2 Tujuan dan Manfaat**

1. Peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan.
2. Peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas.
3. Peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat (*local genius*).
4. Peserta didik mampu menyajikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisa sederhana.
5. Mengurangi drop out (putus sekolah) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah.
6. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan.

#### **2.4.3 Prinsip-prinsip Dasar**

1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan pengetahuan umum untuk para peserta didik agar dapat memberikan bekal dalam persiapan bermasyarakat dan bernegara.
2. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini juga merupakan strategi dalam memberikan informasi manfaat dan dampak akan kependudukan melalui integrasi mata pelajaran, kegiatan kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan yang relevan lainnya.
3. Sekolah Siaga Kependudukan, mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak akan menambah jam pelajaran dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ini diharapkan akan mempertajam materi yang dibahas, atau melalui mata pelajaran muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan wadah bagi program-program yang telah digulirkan BKKBN sebelumnya seperti PIK Remaja Jalur Pendidikan dan Genre *Goes To School* sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan.

5. Sekolah Siaga Kependudukan, merupakan program berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah baik secara geografis maupun administratif.
6. Sekolah Siaga Kependudukan, bersifat gradual meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran, sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan.
7. Sekolah Siaga Kependudukan, konsisten dilaksanakan selama mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.
8. Sekolah Siaga Kependudukan, mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal mereka sendiri. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya masing-masing.

#### **2.4.4 Tahapan Pembentukan**

- a. Persiapan (rapat koordinasi antar OPD dan mitra terkait);
- b. Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi dengan lembaga terkait (Perwakilan BKKBN, Dinas/Badan KKB, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama) sesuai dengan peran dan kewenangannya
- c. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan;
- d. Penyiapan materi/modul pendidikan kependudukan yang telah tersedia (Nasional dan Daerah);
- e. Orientasi/Diklat guru-guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) seputar pengetahuan kependudukan;
- f. Koordinasi dan penguatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) tentang penerapan SSK di sekolah yang bersangkutan;
- g. Dilengkapi dengan perpustakaan/informasi tentang materi-materi



- kependudukan (Population Corner/Pojok Kependudukan);
- h. Uji coba pelaksanaan;
  - i. Pencanaan SSK;
  - j. Pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah.

## **2.5 Indikator Assessment Sekolah Siaga Kependudukan**

Dalam penilaian yang dilakukan ke sekolah terdapat beberapa indikator yang akan digunakan sebagai tolak ukur keterlibatan sekolah dalam program sekolah siaga kependudukan, diantaranya yaitu;

### **Surat Keputusan SSK Kepala Sekolah**

#### **a. Surat Keputusan SSK Kepala Sekolah**

Surat Keputusan (SK) merupakan surat ketetapan yang dibuat oleh suatu instansi atau badan yang dalam hal ini terkait SSK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Adanya surat keputusan berfungsi sebagai keputusan resmi tertulis bahwa sekolah terkait bersedia untuk menjadi bagian dari Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

#### **b. Pojok Kependudukan**

Salah satu indikator dari SSK yaitu adanya pojok kependudukan. Pojok kependudukan merupakan tempat yang berisi informasi terkait kependudukan yang dapat berupa buku, gambar, grafik, peta, ornamen, atau lainnya. Pojok kependudukan ini merupakan salah satu sarana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah. Indikator pojok kependudukan ini dalam SSK kategori dasar dan SSK kategori paripurna berbeda. Pojok kependudukan dalam SSK kategori dasar dapat digabungkan dengan perpustakaan, sudut baca, pojok baca dan lainnya. Ketika di tempat-tempat tersebut sudah terdapat materi mengenai kependudukan maka sudah dapat dikatakan sebagai pojok kependudukan. Namun berbeda dengan SSK kategori paripurna, dikatakan pojok kependudukan ketika sudah memiliki tempat atau ruang tersendiri sesuai dengan prosedur yang ada.

c. Orientasi Penyusunan RPP Terintegrasi Materi Kependudukan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan tujuan agar siswa mampu mencapai kompetensi dasar. Adanya RPP yang terintegrasi dengan materi kependudukan akan memudahkan para guru dalam kegiatan belajar mengajar karena sudah ada pedoman baik mengenai capaian pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan belajar, serta metode evaluasi pembelajaran. Dalam orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan yang menjadi ukuran adalah jumlah guru yang terlibat dalam proses penyusunan. Sama halnya dengan pokok kependudukan, orientasi penyusunan RPP terintegrasi pada SSK kategori dasar dan kategori paripurna memiliki perbedaan. Dalam SSK kategori dasar sejumlah 1-2 guru yang mendapat orientasi. Sedangkan, dalam SSK kategori paripurna terdapat >2 guru yang mendapat orientasi.

d. Tersusunnya Kurikulum Materi Kependudukan dalam Pembelajaran di Kelas

Pada dasarnya, materi kependudukan dapat diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran, contohnya pelajaran Biologi pada saat menyampaikan materi reproduksi, dapat mengintegrasikan masalah reproduksi sehat remaja. Kemudian, pelajaran Geografi, ada materi yang membahas masalah kependudukan, seperti masalah kelahiran, kematian, perpindahan/ migrasi penduduk dibahas secara mendalam. Tersusunnya kurikulum materi kependudukan merupakan output dari orientasi penyusunan RPP. Sehingga, dari orientasi tersebut akan dihasilkan dokumen RPP mata pelajaran yang materinya sudah terintegrasi dengan materi kependudukan. Tersusunnya kurikulum materi kependudukan pada SSK kategori dasar juga berbeda dengan SSK kategori paripurna. Dalam SSK kategori dasar terdapat 1-2 RPP

yang tersusun. Sedangkan, dalam SSK kategori paripurna terdapat >2 RPP yang tersusun.

- e. Integrasi Materi Kependudukan dengan Kegiatan Ekstrakurikuler atau Kesiswaan

Tidak hanya diintegrasikan dengan mata pelajaran, materi kependudukan juga dapat diintegrasikan dengan ekstrakurikuler maupun kegiatan kesiswaan. Integrasi masalah kependudukan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat melalui pramuka saka kencana, PMR, kader kesehatan siswa-siswi, dan lainnya.

- f. Papan Nama SSK

Adanya papan nama SSK bertujuan sebagai identitas yang menunjukkan bahwa sekolah terkait merupakan Sekolah Siaga Kependudukan.

- g. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)

PIK-Remaja merupakan salah satu kegiatan dari program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja). PIK Remaja memiliki prinsip dikelola dari, oleh dan untuk remaja. Tujuan dari PIK Remaja sendiri yaitu untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya bagi usia remaja

## **BAB 3**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Lokasi MBKM by Design FKM UNAIR**

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan pada instansi:

Nama Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

Alamat Instansi : Jalan Kedungsari No 18 Surabaya

Telepon : (031) 5346317

Email : dp5asurabaya@gmail.com

Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### **3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR**

Pelaksanaan magang dilakukan secara offline di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Waktu pelaksanaan kegiatan magang dimulai pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Bentuk kegiatan magang sesuai dengan rencana kerja dari pihak fakultas. Setiap harinya mahasiswa membuat rincian kegiatan kerja yang dilakukan yang kemudian dilaporkan pada pembimbing instansi. Selain itu, setiap minggunya terdapat kegiatan pokok yang dilaksanakan sesuai pada timeline kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan MBKM by Design FKM UNAIR di DP3APPKB**

No	Kegiatan	Agustus				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Pra Pelaksanaan Magang</b>																	
1.	Pembekalan Magang oleh Fakultas																
2.	Pengajuan Proposal Magang kepada instansi																
<b>Pelaksanaan Magang</b>																	
1.	Pembukaan magang oleh instansi																
2.	Pembekalan magang oleh instansi																
3.	Pelaksanaan kegiatan magang																
<b>Pasca Pelaksanaan Magang</b>																	
4.	Penyusunan laporan magang																
5.	Seminar hasil magang																

### **3.3 Metode Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR**

Dalam pelaksanaan magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang tepatnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdapat beberapa metode yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan magang yang meliputi:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap objek tertentu yang dalam hal ini pengamatan dilakukan terhadap suatu pelaksanaan kegiatan di instansi tempat magang. Kegiatan observasi dapat dilakukan saat pelaksanaan magang, baik di dalam maupun di luar kantor. Saat pelaksanaan magang, kegiatan observasi lebih banyak dilakukan di luar magang karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan yaitu mengobservasi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program “Sekolah Siaga Kependudukan” yang berjumlah 14 sekolah. Kegiatan observasi tambahan lainnya yaitu mengikuti rapat-rapat perencanaan, koordinasi, maupun evaluasi program-program di DP3APPKB.

#### **2. Partisipasi**

Partisipasi yaitu ikut serta membantu dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi tempat magang baik dalam bentuk perencanaan, pelayanan, maupun evaluasi yang juga dapat dilakukan di dalam maupun diluar kantor. Selama pelaksanaan kegiatan magang terdapat beberapa kegiatan yang diikuti, seperti menghadiri acara forum Konsultasi Publik Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Surabaya 2021-2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Kota “Bapekko” Surabaya, berpartisipasi dalam kegiatan survei kepedulian remaja terhadap stunting, serta berpartisipasi dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat di RSUD Dr. R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

### 3. Assessment

Asesmen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari proses dan hasil kegiatan sebelumnya untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi yang sudah dilakukan. Secara keseluruhan, terdapat 168 sekolah di asesmen yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah sudah memenuhi komponen-komponen yang menunjukkan partisipasi dalam program “Sekolah Siaga Kependudukan”.

### 4. In Depth Interview

In Depth Interview merupakan yaitu suatu metode wawancara mendalam dengan pegawai instansi tempat magang untuk memperoleh informasi terkait cakupan dan tupoksi kerja serta menanyakan suatu hal yang kurang dimengerti untuk memperoleh penjelasan dalam suatu permasalahan atau suatu kegiatan. Wawancara mendalam juga dilakukan kepada sekolah-sekolah yang memiliki permasalahan terkait partisipasinya dalam program “Sekolah Siaga Kependudukan” sehingga dapat ditemukan akar permasalahan.

### 5. Koordinasi

Koordinasi dilakukan sebagai usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dari beberapa unit. Koordinasi dilakukan agar tidak ada miss communication dalam suatu pelaksanaan kegiatan maupun perbedaan persepsi. Setiap kegiatan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan pembimbing.

### 6. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada sasaran dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian

dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang, pendampingan dilakukan di sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program SSK.

7. Diskusi dan tanya jawab

Diskusi dan tanya jawab, berupa pengarahan dan penjelasan dari pembimbing magang institusi serta pegawai instansi tempat magang untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai ilmu yang berkaitan dengan lingkup pengendalian penduduk, keluarga berencana dan program kerja yang ada di lokasi magang.

8. Studi literatur

Studi literatur bertujuan untuk mencari bahan referensi untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan magang.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diambil dan diperoleh selama kegiatan magang adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil turun lapangan kegiatan assessment SSK yang dilakukan di 168 sekolah di Surabaya baik di tingkat menengah pertama maupun menengah keatas.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

##### **4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**

DP3APPKB Kota Surabaya berlokasi di Jalan Kedungsari Nomor 18 Surabaya. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DP3APPKB Kota Surabaya memiliki tiga kegiatan bidang yang dibawah oleh Sub Bagian Keuangan, yaitu Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (PUG PHA), Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA), dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB). DP3APPKB Kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misinya. Visi dan misi DP3APPKB Kota Surabaya yaitu:

Visi:

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

Misi:

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

##### **4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**

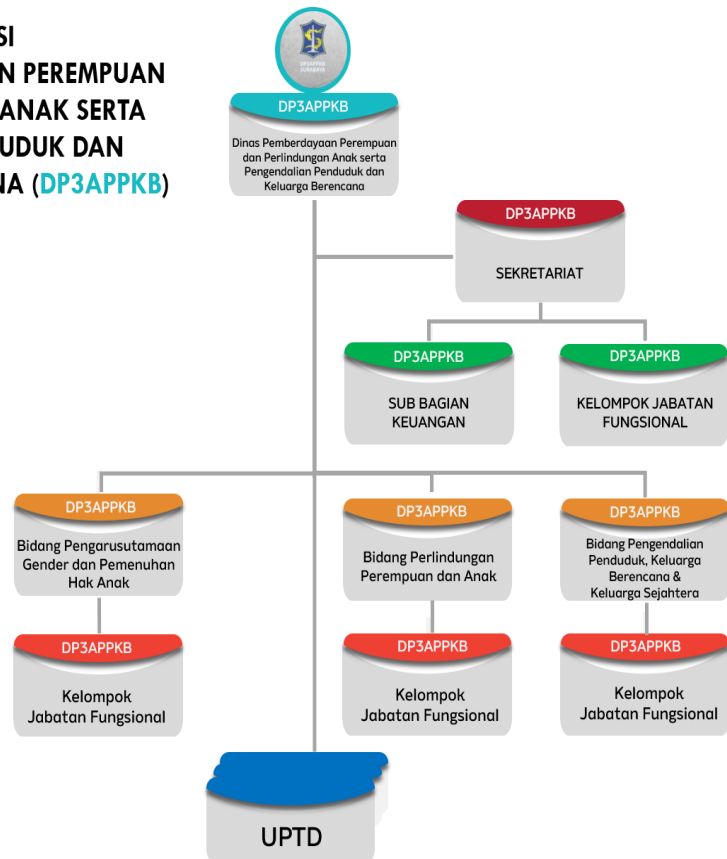
Tugas dari DP3APPKB yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. DP3APPKB

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, DP3APPKB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)**



Gambar 1. Struktur Organisasi DP3APPKB

#### **4.1.4 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3APPKB Kota Surabaya**

##### **1. Seksi Pengendalian Penduduk**

Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait pengendalian penduduk
- c. Melaksanakan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait pengendalian penduduk
- e. Menyiapkan bahan pengolahan data pengendalian penduduk
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pengendalian penduduk
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

##### **2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi

- e. Menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

## **4.2 Pembelajaran Pencapaian Learning Outcome Mata Kuliah**

### **4.2.1 Metodologi Penelitian**

Dalam mata kuliah metodologi penelitian terdapat beberapa topik bahasan dalam perkuliahan yang dapat diimplementasikan selama kegiatan magang diantaranya yaitu penentuan instrumen dan prosedur pengumpulan data yang diterapkan dalam kegiatan assessment Sekolah Siaga Kependudukan. Di dalam kegiatan assessment SSK proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengenai indikator-indikator kesiapan sekolah berpartisipasi dalam program SSK. Selain itu, penerapan analisis data dan penyajian informasi juga dilakukan. Analisis data dilakukan untuk mengetahui persentase sekolah yang sudah termasuk dalam kategori SSK paripurna, dasar, terdaftar, maupun tidak terdaftar. Dari hasil analisis data, dapat menghasilkan informasi yang dapat dibuat menjadi pengelompokkan, perbandingan, persamaan, dan perbedaan yang penyajian informasi dapat dalam bentuk persen, grafik, dan diagram.

### **4.2.2 Seks, Gender, dan Seksualitas**

Dalam pelaksanaan MBKM by Design materi yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan magang pada mata kuliah Seks, Gender, dan Seksualitas yaitu mengenai kesehatan reproduksi yang mana dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), kesehatan

reproduksi memiliki peran penting dalam kependudukan. Kesehatan reproduksi mengandung banyak elemen didalamnya, seperti hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), penyakit menular seksual, pencegahan HIV/AIDS, seksualitas manusia, masalah remaja, dan lainnya. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa juga diberi kesempatan langsung untuk mengimplementasikan materi mengenai kesehatan reproduksi ke sekolah-sekolah. Implementasi tersebut dalam bentuk sosialisasi ke siswa-siswi saat pelaksanaan assessment SSK. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan lebih banyak remaja yang sadar akan pentingnya wawasan mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, diharapkan juga dapat mencegah permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada remaja, seperti risiko kehamilan yang tidak diinginkan, risiko infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, unsafe abortion, dan kekerasan seksual.

#### **4.2.3 Penilaian Kritis Kesehatan Reproduksi dan KIA**

Sama halnya dengan mata kuliah Seks, Gender, dan Seksualitas, penerapan mata kuliah penilaian kritis kesehatan reproduksi dan KIA juga melalui sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah. Di dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan isu-isu khususnya mengenai program kesehatan reproduksi pra sekolah dan remaja, program Keluarga Berencana (KB), dan program pembangunan keluarga. Dalam implementasinya, program-program tersebut termuat dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang mana merupakan salah satu indikator dalam program SSK. Pada dasarnya program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) memiliki tujuan yang mirip dengan PIK-R, yaitu sama-sama membantu remaja memiliki status kesehatan reproduksi yang baik melalui pemberian informasi, pelayanan konseling, dan pendidikan keterampilan hidup.

#### **4.2.4 Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas**

Penerapan mata kuliah Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas dalam pelaksanaan magang MBKM by Design diimplementasikan

materi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan SSK. Pada mata pelajaran matematika, siswa diajarkan tentang perhitungan yang berkaitan tentang kelahiran dan kematian penduduk dengan statistik sederhana diagram batang, garis, dan lingkaran.

#### **4.2.5 Pengantar Sistem Informasi Geografis**

Dalam mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Geografis materi yang dapat diimplementasikan yaitu mengenai pemakaian aplikasi google earth saat turun lapangan untuk melakukan assessment. Melalui aplikasi tersebut mahasiswa dapat mengobservasi lingkungan sekitar sekolah sebelum turun lapangan untuk mengetahui keadaan serta karakteristik penduduk sekitar sekolah. Hal tersebut akan memudahkan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah karena mengetahui latar belakang keadaan di lingkungan sekolah. Kemudian, praktik GPS titik koordinat juga diterapkan saat turun lapangan ketika mencari lokasi sekolah yang akan dituju.

#### **4.2.6 Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan**

Penerapan mata kuliah Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan dilakukan dalam kegiatan penginputan data dari aplikasi “Sayang Warga” ke aplikasi “Elsimil”. Data yang di input merupakan data kependudukan seperti ibu hamil, ibu nifas, pasangan calon pengantin, dan balita stunting. Setiap mahasiswa ditargetkan untuk menginput data sebanyak 569 sasaran. Selain itu, penginputan data juga dilakukan dari data berbentuk fisik ke aplikasi “Sayang warga”.

#### **4.2.7 Komunikasi dan Pemasaran Integrasi Kesehatan**

Dalam pelaksanaan MBKM by Design, materi yang dapat diimplementasikan yaitu mengenai public relation dalam pelaksanaan advokasi ke sekolah yang tidak setuju untuk mengikuti program SSK. Kemampuan, public relation sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menjalin hubungan positif dengan pihak sekolah agar upaya advokasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

#### **4.2.8 Teknik Sampling dan Penentuan Besar Sampel**

Pada mata kuliah lintas minat teknik sampling dan penentuan besar sampel, penerapannya dilakukan pada pelaksanaan assesment, yaitu mengenai teknik non probability sampling dengan sampling purposive untuk mengetahui kondisi sekolah dalam pelaksanaan SSK maka ketika assesment sehingga sumber data yang diwawancarai yakni Kepala Sekolah atau Pembina SSK. Dengan menggunakan purposive sampling maka tim assesment dapat memilih sekolah yang ingin menjadi sasaran utama dengan memberikan kriteria inklusi dan eksklusi pada pemilihan sekolah sasaran.

#### **4.2.9 Penyakit Akibat kerja**

Penerapan materi lintas minat Penyakit Akibat Kerja dalam pelaksanaan MBKM by Design yaitu terkait pencegahan terhadap paparan debu yang terjadi ketika pelaksanaan assesment SSK ke sekolah-sekolah. Dengan adanya materi tersebut, mahasiswa dapat mengantisipasi penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh keterpaparan debu.

### **4.3 Gambaran Umum SMPN 59 Surabaya**

SMP Negeri 59 Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Wiyung yang sudah berdiri sejak tahun 2016. SMP Negeri 59 terletak di jalan Klumprik PDAM Nomor 59 Balas klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Letak SMP Negeri 59 juga tidak jauh dari SMP lainnya seperti SMP Negeri 34 Surabaya, SMP Negeri 51 Surabaya, dan juga SMP Negeri 24 Surabaya. SMP Negeri 59 tergolong sekolah yang belum cukup lama berdiri, tetapi secara umum sudah cukup kondusif serta sarana dan prasarannya sudah memadai. Di kelas 9 terdapat 6 rombongan belajar, kelas 8 terdapat 6 rombongan belajar, dan kelas 7 terdapat 6 rombongan belajar. Dengan adanya zonasi peserta didik yang sekarang menjadi peserta didik di SMP Negeri 59 Surabaya lebih banyak didominasi di sekitar wilayah Wiyung dan sekitarnya. Hal ini memudahkan sekolah untuk mengenal karakteristik peserta didik, orang tua dan lingkungan tempat tinggal. SMP Negeri 59 juga

merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A, artinya SMP Negeri 59 Surabaya sudah memiliki mutu yang amat baik.

#### **4.4 Persiapan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya**

Dalam pengimplementasian program SSK diperlukan berbagai persiapan baik kesiapan sumber daya manusia maupun kesiapan fisik dan sarana prasarana sekolah dalam pelaksanaan program SSK. Dalam hal terkait sumber daya manusianya, SMPN 59 Surabaya mempersiapkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, siswa-siswi yang siap dibina untuk menjadi pengurus, serta seluruh warga sekolah yang juga ikut andil dalam proses persiapan program SSK. Sementara ini guru yang terlibat dan mengajar SSK adalah guru mata pelajaran IPS. Meskipun masih satu mata pelajaran yang terintegrasi dan sudah memiliki RPP, mata pelajaran lainnya masih dalam proses pembuatan RPP yang terintegrasi dengan materi kependudukan. Guru yang terlibat dalam pelaksanaan SSK memiliki beberapa strategi pembelajaran yang dimasukkan ke dalam proses KBM, diskusi, debat dan lainnya. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh SMPN 59 Surabaya adalah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memenuhi indikator yang ada dalam program SSK seperti pojok kependudukan, papan nama SSK, RPP, ekstrakurikuler PIK-R serta persiapan mengenai anggaran untuk proses pelaksanaan SSK juga sudah dipersiapkan.

#### **4.5 Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya**

Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang diterapkan di SMP Negeri 59 Surabaya merupakan jalur formal. Program SSK yang diterapkan di dalamnya memuat pendidikan kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta integrasi mata pelajaran dengan materi kependudukan. SMP Negeri 59 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang sudah menjadi SSK dengan kategori dasar sehingga semua indikator program SSK sudah dipenuhi. Uraian dari indikator program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang ada di SMP Negeri 59 Surabaya sebagai berikut:



a. Surat Keputusan SSK Kepala Sekolah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 59 Surabaya Nomor: 188.4/180/436.7.1.P59/2023 tentang pembentukan dan pengurus Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMP Negeri 59 Kota Surabaya Tahun 2023 memutuskan membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 59 Surabaya. Kemudian, membentuk susunan pengurus Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2023 dan segala biaya yang timbul akibat keputusan tersebut dibebankan pada anggaran menurut peraturan yang berlaku. Surat Keputusan SSK dibuat pada tanggal 15 Mei 2023. Di dalam surat keputusan SSK kepala sekolah juga terdapat susunan pengurus SSK yang kepengurusannya terdiri dari kepala sekolah sebagai perlindungan dan pertanggungjawaban, wakil kepala sekolah, waka kurikulum, dan waka humas sebagai penasehat dan pembimbing, kepala perpustakaan, waka kesiswaan, perwakilan guru, serta penyuluh KB sebagai pembina. Sedangkan, untuk susunan organisasi bagian ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dipegang oleh perwakilan siswa-siswa serta anggotanya berasal dari seluruh siswa SMP Negeri 59 Surabaya.

b. Pojok Kependudukan

Pojok kependudukan menjadi salah satu identitas dari sekolah yang telah melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan. Pojok kependudukan dijadikan sebagai salah satu sarana dan sebagai pusat siswa-siswi dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kependudukan. Program sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 59 Surabaya juga didukung dengan adanya fasilitas pojok kependudukan. Pojok kependudukan di SMP Negeri 59 Surabaya dilengkapi dengan rak buku, buku-buku yang berkaitan dengan kependudukan, papan informasi, poster kependudukan, dan beberapa media lainnya. Dengan adanya fasilitas pojok kependudukan maka akan memberikan kesempatan yang sama untuk para siswa dalam

memperluas wawasan di bidang kependudukan. Namun, kondisi pojok kependudukan di SMP Negeri 59 masih belum maksimal karena ketersediaan buku masih sangat kurang khususnya mengenai buku kependudukan. Kemudian, masih belum adanya tempat duduk atau karpet yang dapat digunakan siswa-siswi untuk membaca langsung di pojok kependudukan masih hanya sebatas rak buku. Meskipun demikian, dari pihak sekolah akan terus berupaya untuk mengembangkan pojok kependudukan agar siswa-siswa lebih tertarik dan lebih nyaman ketika akan membaca buku-buku dan informasi berwawasan kependudukan.



Gambar 2. Pojok Kependudukan SMP Negeri 59 Surabaya

c. Tersusunnya Kurikulum Materi Kependudukan dalam Pembelajaran di Kelas

Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Berdasarkan kondisi di lapangan, Sekolah Siaga Kependudukan yang dijalankan oleh SMP Negeri 59 Surabaya merupakan pengintegrasian ke dalam RPP mata pelajaran yang sudah ada, sehingga bukan merupakan penambahan mata pelajaran baru. Mata pelajaran yang diintegrasikan adalah Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) dengan kompetensi awal yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi Dinamika Penduduk di Indonesia. Kegiatan pembelajaran berupa penjelasan petunjuk kerja dan lembar aktivitas terlebih dahulu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendalami materi bagi peserta didik tentang kondisi perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk masyarakat Indonesia. Kemudian, peserta didik akan mengerjakan lembar aktivitas tersebut dengan bimbingan guru. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mengenai hasil diskusi terkait lembar aktivitas. Sarana pembelajaran yang digunakan yaitu melalui video dan gambar tentang perkembangan penduduk. Sedangkan, prasarana yang digunakan meliputi laptop, LCD proyektor, smartphone, dan jaringan internet. Saat ini RPP yang sudah terbentuk masih mata pelajaran IPS saja, tetapi untuk mata pelajaran lain seperti PKN, Bahasa Indonesia, dan IPA masih dalam tahap pendiskusian dan perancangan.

d. Orientasi Penyusunan RPP Terintegrasi Materi Kependudukan

Dalam membentuk dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan peserta didik khususnya terkait kependudukan, guru memiliki peran yang sangat penting. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Gedung Siola sebelumnya bertujuan untuk mengenalkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan meningkatkan kompetensi guru sehingga perwakilan yang mengikutinya bisa mentransfer ilmunya kepada seluruh warga sekolah. Di samping itu, guru juga dituntut untuk mampu dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sedemikian rupa untuk menyisipkan atau mengarah ke materi-materi kependudukan. Dalam indikator ini, yang menjadi tolak ukur yaitu jumlah guru yang terlibat dalam proses penyusunan RPP. Di SMP

Negeri 59 Surabaya sejauh ini masih terdapat dua guru yang terlibat. Hal tersebut dikarenakan di SMP Negeri 59 Surabaya mata pelajaran yang terintegrasi dengan materi kependudukan dan sudah mempunyai RPP masih satu yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun berdasarkan hasil wawancara saat assessment, guru dari beberapa mata pelajaran lain yang dapat diintegrasikan dengan materi kependudukan masih dalam proses perancangan RPP terintegrasi.

e. Integrasi Materi Kependudukan dengan Kegiatan Ekstrakurikuler atau Kesiswaan

Selain diintegrasikan dengan mata pelajaran, materi kependudukan juga perlu untuk diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas agar para siswa lebih bebas dalam berkreasi dan memiliki waktu lebih untuk belajar mengenai kependudukan. Di SMP Negeri 59 Surabaya, SSK diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kesiswaan seperti pramuka dan UKS. Dalam kegiatan yang ada di UKS, sekolah bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk menyampaikan materi mengenai generasi berencana, kesehatan reproduksi, serta cara-cara untuk menghindari hal-hal negatif yang akan berdampak negatif di masa depan. Dengan adanya pihak dari puskesmas secara langsung diharapkan peserta didik dapat berkonsultasi secara langsung terkait kesehatan maupun permasalahan-permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi.

f. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)

PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja merupakan kegiatan diluar mata pelajaran yang bagian dari program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Di SMP Negeri 59 sudah terbentuk PIK-R tetapi, berdasarkan hasil assessment saat ini istilah namanya lebih dikenal dengan sebutan “Pemantik” atau Pembimbing Teman Terbaik. Adanya kegiatan seperti PIK-R ini merupakan salah satu wujud kegiatan program generasi berencana (GenRe) yang bertujuan untuk

sarana edukasi peserta didik tentang berbagai hal yang berkaitan dengan remaja dan menjadi sarana para guru untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didiknya yang mungkin merasa malu jika diungkapkan langsung kepada guru dan orang tuanya. Pada dasarnya, konsep dalam PIK-R dan Pemantik ini



Gambar 3. PIK Remaja SMP Negeri 59 Surabaya

sama karena sama-sama menjadi media untuk saling berdiskusi dan berkonsultasi dengan teman sebayanya terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi remaja. Kegiatan Pemantik di SMP Negeri 59 Surabaya sudah dilakukan dengan baik karena rutin dilakukan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam, antara lain seperti pendampingan, sosialisasi, konseling, dan lainnya. SMP Negeri 59 Surabaya juga memiliki struktur organisasi Pemantik yang terdiri dari perwakilan siswa-siswi di setiap jenjang kelas.

g. Papan Nama SSK

Adanya papan nama SSK menjadi salah satu bentuk identitas yang dimiliki sekolah yang menunjukkan bahwa sudah berpartisipasi dalam program Sekolah Siaga Kependudukan. SMP Negeri 59 Surabaya sudah memiliki papan nama SSK yang sementara ini dalam bentuk banner yang diletakkan di samping gerbang pintu masuk sekolah.



Gambar 4. Papan Nama SSK SMP Negeri 59 Surabaya

#### **4.6 Hambatan Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 59 Surabaya**

Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 59 Surabaya bukan tanpa kendala. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan SSK di SMP Negeri 59 Surabaya meliputi:

- a. Sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal salah satunya yaitu pojok kependudukan. dalam proses pengadaan fasilitas tersebut terdapat kendala yaitu masih kesulitan dan terbatasnya bahan bacaan yang berkaitan dengan kependudukan. Terbatasnya bahan bacaan tersebut menyebabkan pihak sekolah harus berupaya keras untuk melengkapi buku-buku bacaan yang ada di pojok kependudukan agar pengetahuan dan wawasan yang didapatkan siswa-siswi juga semakin luas. Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara membeli buku dan mengupayakan pengadaan sumber bacaan dari pihak dinas.
- b. Implementasi kegiatan kependudukan belum terlaksana secara maksimal. Saat ini SMP Negeri 59 Surabaya masih belum memiliki kegiatan rutin yang berkaitan dengan kependudukan. Penerapan program SSK masih sebatas pengintegrasian ke mata pelajaran dan penyisipan ke kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pokok yang dikhususkan untuk membahas mengenai kependudukan belum berjalan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya yang bisa dijadikan sebagai

pengisi materi atau narasumber jika mengadakan sosialisasi mengenai kependudukan. Dari pihak SMP Negeri 59 Surabaya sendiri masih membutuhkan bantuan dari instansi terkait untuk mengadakan sosialisasi kepada orang tua. Karena menurut pihak sekolah selain peserta didik, orang tua juga perlu diberi pemahaman mengenai siaga kependudukan agar tidak ada kesalahpahaman dan perbedaan persepsi.

#### **4.7 Kendala Pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR**

Dalam pelaksanaan MBKM by Design FKM UNAIR yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya terdapat beberapa kendala selama proses pelaksanaannya. Beberapa kendala meliputi:

- a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak dinas dan mahasiswa magang dalam perencanaan suatu kegiatan. Seringkali timeline-timeline kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa tidak dapat berjalan dengan sesuai.
- b. Dalam pelaksanaan salah satu program dalam magang yaitu Sekolah Siaga Kependudukan, mahasiswa magang dapat dikatakan belum sepenuhnya mengerti dan paham mengenai konsep, persepsi, dan keinginan yang diharapkan dari pihak instansi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya orientasi atau pembekalan awal yang diberikan kepada mahasiswa. Sehingga dalam pengimplementasian program seringkali terdapat miss communication dan miss persepsi ketika turun lapangan dan berhadapan dengan pihak luar
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu *basecamp* para mahasiswa, dapat berdampak pada kesulitan menentukan jadwal ke kantor karena seringkali tempat tersebut digunakan untuk rapat atau kegiatan lain.
- d. Pemberian jadwal yang seringkali mendadak dari instansi dapat mengakibatkan ketidakmaksimalan para mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Generasi muda yang berkualitas mempunyai peluang sebagai penerus bangsa untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi, terbentuknya kepedulian dan isu kependudukan berdampak pada tumbuhnya rasa rasa tanggung jawab untuk ikut serta mencegah dan ikut serta mencari solusi dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Maka dari itu dengan adanya Sekolah Siaga Kependudukan diharapkan mampu membentuk karakter remaja akan sadar isu isu yang terjadi dalam penduduk dan ikut serta berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Berdasarkan kondisi di lapangan, secara administratif SMP Negeri 59 Surabaya sudah memenuhi semua indikator SSK mulai dari SK Kepala Sekolah, ketersediaan RPP terintegrasi, adanya pojok kependudukan, integrasi materi kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler, adanya PIK-R, serta papan nama SSK. Sehingga dari hasil assessment yang dilakukan SMP Negeri 59 Surabaya menjadi SSK dengan kategori dasar yang jika dikembangkan bisa menjadi SSK dengan kategori paripurna. Namun, dalam penerapan kegiatan terkait kependudukan itu sendiri pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti sarana dan prasarana belum maksimal serta Implementasi kegiatan kependudukan belum terlaksana secara maksimal pula. Sehingga masih belum ada kegiatan rutin yang dikhususkan untuk memberikan wawasan mengenai kependudukan kepada para siswa.



## 5.2 Saran

1. Bagi Pihak Sekolah
  - a. Pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga lebih menunjang pelaksanaan program SSK
  - b. Kepala sekolah dapat mengikutsertakan guru-guru yang terlibat dalam pelaksanaan SSK untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesionalannya dalam menguasai materi SSK, sehingga dapat menginternalisasikannya dengan lebih baik kepada siswa-siswi yang diajarkan
  - c. Kepala sekolah beserta guru dapat menjadwalkan kegiatan kunjungan siswa ke instansi terkait pelaksanaan SSK agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam SSK terutama terhadap nilai delapan fungsi keluarga.
2. Bagi Pihak DP3APPKB
  - a. Bagi pihak DP3APPKB dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi mengenai kependudukan dengan melibatkan sekolah-sekolah.
  - b. Pihak DP3APPKB dapat melakukan pendampingan dan pelatihan secara rutin terhadap pihak sekolah dalam melaksanakan program SSK sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya
  - c. Pihak DP3APPKB juga hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada sekolah yang sudah menerapkan program SSK
3. Bagi Pihak Fakultas
  - a. Bagi pihak fakultas diharapkan dapat melakukan kajian ulang dalam pemilihan tempat magang MBKM by Design agar lebih sesuai dengan mata kuliah yang diampu di semester 7
4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam memahami Sekolah Siaga Kependudukan, khususnya pelaksanaan SSK di SMP Negeri 59 Surabaya. Untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, A., Hartanti, F. I., & Sulistyorini, Y. (2020). Implementation Analysis Of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) In East Java 2019. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 9(2), 137–145.
- Ahmadi, A. 2016. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aini, Syarifah. 2022. Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan). *Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 65-70.
- Awwaluddin, M.A.M dan FX. Sri Sadewo. 2021. Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Dalam Perspektif Teori AGIL Talcott Parssons. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(1).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). Pedoman pengelolaan Pendidikan kependudukan melalui sekolah siaga kependudukan (SSK) di SMP, SMA dan sederajat. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
- BKKBN. 2018. *Jurnal Keluarga Informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga*. Available at: [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal\\_Keluarga\\_Edisi\\_Keempat\\_2018.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf).
- Fajri, W.A, dkk. 2020. Identifikasi Kesiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Di Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Pringkuku. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1).
- Hutasoit, Imelda. 2017. Masalah Kependudukan di Indonesia: Penulisan Buku Literatur IPDN.
- Kartikasari, Yulia dan Nur Hidayah. 2021. Implementasi Program Siaga Kependudukan pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(2).
- Mark Skousen. 2005. Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Jakarta: Prenada Media
- Mu'awwanah, U., & Ridho Illah, G. R. (2022). Problematika Kependudukan Indonesia. Al-Tsaman: *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 63-78. Available at: <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/87>.
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 2(6), 51–52.
- Samosir, Omar Bulan, dkk. 2020. Modul 1 Konsep dan Dasar Kependudukan. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN.
- Sari, A.P, dkk. Tanpa tahun. Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1).
- Sudrajat dan Shigbatullah Mujadidi. 2023. Implementasi program sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 10(2).
- Ulfah, Restu. 2021. Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pembelajaran Geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2).

Yulianti, D. (2017). Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108.



## LAMPIRAN




### Lampiran I. Logbook Kegiatan Magang

#### LOGBOOK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TAHUN 2023

**Nama** : Karunia Nur Fadhilla  
**NIM** : 102011133100  
**Instansi / Mitra** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana Kota Surabaya  
(DP3APPKB)  
**Pembimbing Akademik** : Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes  
**Pembimbing Lapangan** : Ervan Dwi P

- Minggu 1 (02 – 05 Oktober 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	02/10/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penerimaan peserta MBKM oleh Ketua DP3APPKB</li><li>- Pembekalan magang dan pemberian materi mengenai DP3APPKB, serta tentang stunting dan Kesehatan reproduksi</li></ul>	
2.	03/10/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian kegiatan yang akan dilakukan selama magang</li><li>- Pemberian materi mengenai aplikasi verval dan elsimil</li><li>- Pembagian kelompok dan wilayah untuk kebutuhan input data ke aplikasi elsimil</li><li>- Penginputan data Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dari aplikasi "Sayang Warga" Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat</li></ul>	

3.	04/10/2023	- Penginputan data Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dari aplikasi "Sayang Warga" Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat	
4.	05/10/2023	- Penginputan data Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dari aplikasi "Sayang Warga" Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat	
5.	06/10/2023	- Penginputan data Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dari aplikasi "Sayang Warga" Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200



**TTD Pembimbing Akademik**






(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● Minggu 2 (09 – 13 Oktober 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	09/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan pre-test yang diberikan dari DP3APPKB</li> <li>- Penginputan data Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya dari aplikasi “Sayang Warga” Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat</li> <li>- Diskusi kelompok membahas laporan kegiatan di media sosial</li> </ul>	
2.	10/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekapan target penginputan data dari aplikasi “Sayang Warga” Pemerintah Kota Surabaya ke aplikasi elsimil terpusat</li> <li>- Evaluasi dari proses penginputan data di aplikasi elsimil</li> <li>- Pembekalan dan pemberian materi mengenai SSK oleh coordinator pelaksanaan SSK</li> <li>- Diskusi kelompok untuk pembuatan jadwal kegiatan turun lapangan “Assesment SSK”</li> </ul>	

3.	11/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi oleh Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si</li> <li>- Persiapan terkait survei kepedulian remaja terhadap stunting</li> <li>- Perancangan dan pembuatan instrumen kuesioner terkait survei kepedulian remaja terhadap stunting</li> </ul>	
4.	12/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghadiri acara forum Konsultasi Publik Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Surabaya 2021-2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Kota "Bapekko" Surabaya</li> </ul>	
5.	13/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisasi kuesioner Survey dalam rangka Kajian Kepedulian Remaja dalam Pencegahan Stunting</li> </ul>	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200

**TTD Pembimbing Akademik**








(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -



● Minggu 3 (16 – 20 Oktober 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	16/10/2023	- Supervisi oleh Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si - Diskusi kelompok membahas penyusunan draft Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023	
2.	17/10/2023	- Kunjungan ke Dinas Sosial Kota Surabaya	
3.	18/10/2023	- Pengerjaan draft Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023	
4.	19/10/2023	- Pengerjaan draft Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023	
5.	20/10/2023	- Koordinasi Persiapan Assesment Sekolah Siaga Kependudukan 2023	

TTD Pembimbing Lapangan



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)






TTD Pembimbing Akademik



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. 9670924195203200 NIP. -

● Minggu 4 (23 – 27 Oktober 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	23/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Khadijah Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMK Negeri 1 Surabaya</li> </ul>	
2.	24/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Muhammadiyah 4</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 32 Surabaya</li> </ul>	
3.	25/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di Margie Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Kristen Gloria 1 Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 56 Surabaya</li> </ul>	
4.	26/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 51 Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 24 Surabaya</li> </ul>	
5.	27/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Muhammadiyah 17</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 16 Surabaya</li> </ul>	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200






**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● Minggu 5 (30 Oktober – 3 November 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	30/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 34 Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Terbuka 34 Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 59 Surabaya</li> </ul>	
2.	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Khadijah Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMK Negeri 1 Surabaya</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Muhammadiyah 4</li> <li>- Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Kristen Gloria 1 Surabaya</li> </ul>	
3.	01/11/2023	- Merekap hasil Assessment Sekolah Siaga kependudukan	
4.	02/11/2023	- Merekap hasil Assessment Sekolah Siaga kependudukan	
5.	03/11/2023	- Merekap hasil Assessment Sekolah Siaga kependudukan	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200







**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● **Minggu 6 (6 - 10 November 2023)**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	06/11/2023	- Merekap hasil Assessment Sekolah Siaga kependudukan dalam bentuk matriks	
2.	07/11/2023	- Berdiskusi membuat format Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil assessment - Mengelompokkan sekolah berdasarkan prioritas masalah utama agar dapat dilakukan tindak lanjut	
3.	08/11/2023	- Diskusi membahas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) - Supervisi oleh Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si	
4.	09/11/2023	- Membuat proposal Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta matriksnya bersama kelompok masing-masing	
5.	10/11/2023	- Membuat proposal Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta matriksnya bersama kelompok masing-masing	
6.	12/11/2023	- Zoom meeting dalam rangka koordinasi untuk survei ke Rumah Sakit Sosodoro Bojonegoro	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200






**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● Minggu 7 (13 - 17 November 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	13/11/2023	- Survei kepuasan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	
2.	14/11/2023	- Supervisi oleh Bu Lina, Bu Nunik dan Pak Hari - Bimbingan skripsi dan magang dengan Bu Nunik	
3.	15/11/2023	- Rekap hasil survei kepuasan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	
4.	16/11/2023	- Rekap hasil survei kepuasan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro	
5.	17/11/2023	- Input data ke aplikasi "Sayang Warga"	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

**TTD Pembimbing Akademik**










(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. 19670924199203200  
CS Dipindai dengan CamScanner

NIP. -

• Minggu 8 (20 - 24 November 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	20/11/2023	- Diskusi untuk rencana pelaksanaan sosialisasi SSK	
2.	21/11/2023	- Zoom meeting dengan Bu Diah dalam rangka penjelasan tugas untuk UTS dan UAS mata kuliah Sistem Informasi Geografis	
3.	22/11/2023	- Advokasi program SSK di SMK Negeri 1 Surabaya	
4.	23/11/2023	- Briefing dan evaluasi pelaksanaan advokasi SSK - Advokasi program SSK di SMP Negeri 21 Terbuka Surabaya - Advokasi program SSK di SMP Negeri 36 Surabaya	
5.	24/11/2023	- Advokasi program SSK di SMP GIKI Surabaya - Advokasi program SSK di SMP Kristen Elia	
6.	25/11/2023	- Berdiskusi dan membuat soal pre-test dan post-test untuk acara sosialisasi SSK	
7.	26/11/2023	- Zoom meeting dalam rangka briefing dan persiapan pelaksanaan sosialisasi SSK	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200






**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● Minggu 9 (27 November – 1 Desember 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	27/11/2023	- Pelaksanaan sosialisasi SSK di Graha Sawunggaling, Kantor Pemerintahan Kota Surabaya	
2.	28/11/2023	- Merekap data hasil sosialisasi SSK	
3.	29/11/2023	- Supervisi oleh Bu Nurul Fitriyah - Evaluasi pelaksanaan sosialisasi SSK - Tanda tangan untuk keperluan SPJ	
4.	30/11/2023	- Mengerjakan laporan magang dan proposal skripsi	
5.	01/12/2023	- Mengerjakan laporan magang dan proposal skripsi	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200



**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

● Minggu 10 (4 – 8 Desember 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	04/12/2023	- Mengerjakan laporan magang untuk persiapan seminar hasil	
2.	05/12/2023	- Mengerjakan laporan dan PPT magang untuk persiapan seminar hasil	
3.	06/12/2023	- Bimbingan laporan hasil magang dengan Bu Nunik Puspitasari selaku dosen pembimbing	
4.	07/12/2023	- Seminar Hasil Magang MBKM by Design FKM UNAIR 2023	
5.	08/12/2023	- Revisi laporan Hasil Magang MBKM by Design FKM UNAIR 2023	

**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200

**TTD Pembimbing Akademik**




(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -



• **Minggu 11 (11 – 15 Desember 2023)**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	11/12/2023	- Revisi Laporan Magang MBKM - Persiapan Seminar Proposal Skripsi	
2.	12/12/2023	- Revisi Laporan Magang MBKM - Persiapan Seminar Proposal Skripsi	
3.	13/12/2023	- Revisi Laporan Magang MBKM - Persiapan Seminar Proposal Skripsi	
4.	14/12/2023	- Persiapan Seminar Proposal Skripsi	
5.	15/12/2023	- Persiapan Seminar Proposal Skripsi	


**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200

**TTD Pembimbing Akademik**



(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

• Minggu 12 (18 -22 Desember 2023)

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
1.	18/12/2023	- Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Peminatan Biostatistika Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi	
2.	19/12/2023	- Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Peminatan Biostatistika Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi	
3.	20/12/2023	- Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Peminatan Biostatistika Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi	
4.	21/12/2023	- Acara penutupan dan pamitan magang MBKM by Design ke DP3APPKB	
5.	22/10/2023	- Finalisasi laporan MBKM	

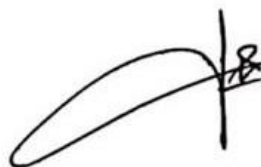
**TTD Pembimbing Lapangan**



(Dr. Nunik Puspitasari, SKM, M.Kes.)

NIP. 19670924199203200

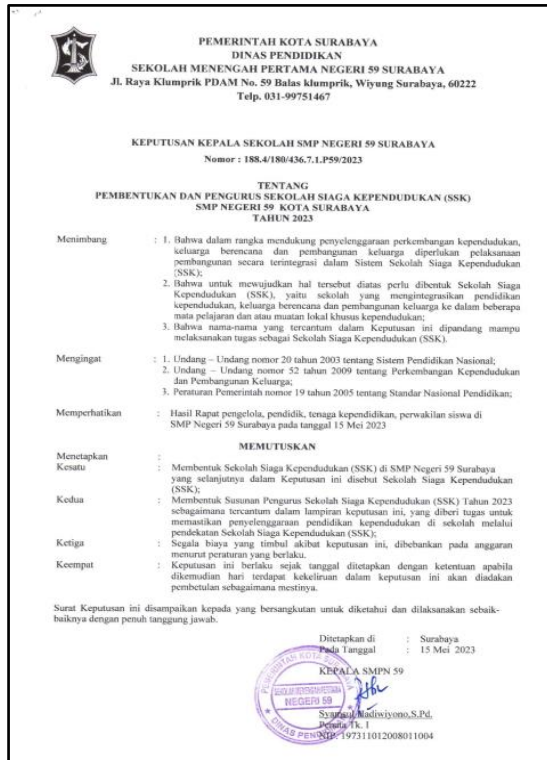
**TTD Pembimbing Akademik**



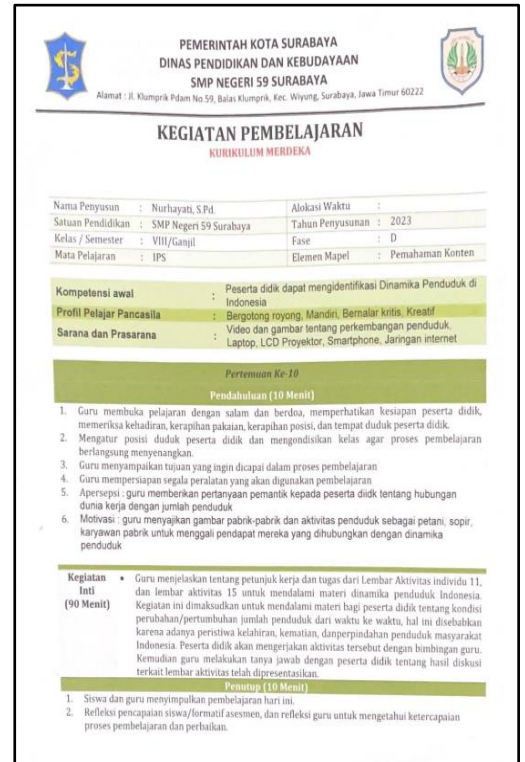
(Ervan Dwi P. A.Md.)

NIP. -

## Lampiran II. Dokumentasi Pelaksanaan Assessment SSK di SMP Negeri 59 Surabaya



SK Sekolah Siaga Kependudukan Kepala Sekolah SMP Negeri 59 Surabaya



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 59 Surabaya






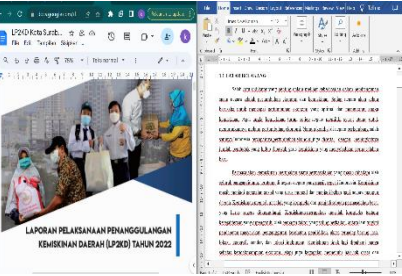


SK Sekolah Siaga Kependudukan Kepala Sekolah SMP Negeri 59 Surabaya



Dokumentasi Pelaksanaan Assessment SSK SMP Negeri 59 Surabaya

**Lampiran III. Dokumentasi Kegiatan Magang**

		
<p><b>Penerimaan dan Pembekalan Magang oleh DP3APPKB (02 Oktober 2023)</b></p>	<p><b>Penginputan data ELSIMIL (03 Oktober 2023)</b></p>	<p><b>Persiapan terkait survei kepedulian remaja terhadap stunting (11 Oktober 2023)</b></p>
		
<p><b>Menghadiri acara forum (Jakstrada) Kota Surabaya 2021-2026 di Bapekko Surabaya (12 Oktober 2023)</b></p>	<p><b>Kunjungan ke Dinas Sosial Kota Surabaya (17 Oktober 2023)</b></p>	<p><b>Pengerjaan draft Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2023 (18 Oktober 2023)</b></p>



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di SMK  
Negeri 1 Surabaya  
(23 Oktober 2023)**



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di SMP  
Muhammadiyah 4  
Surabaya  
(24 Oktober 2023)**



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di SMP  
Negeri 32 Surabaya  
(24 Oktober 2023)**



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di Margie  
Surabaya  
(25 Oktober 2023)**



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di SMP  
Kristen Gloria 1 Surabaya  
(25 Oktober 2023)**



**Assessment Sekolah Siaga  
Kependudukan di SMP  
Negeri 56 Surabaya  
(25 Oktober 2023)**

		
<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 51 Surabaya</b> (26 Oktober 2023)</p>	<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 24 Surabaya</b> (26 Oktober 2023)</p>	<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Muhammadiyah 17</b> (27 Oktober 2023)</p>
		
<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 16 Surabaya</b> (27 Oktober 2023)</p>	<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 34 Surabaya</b> (30 Oktober 2023)</p>	<p><b>Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 59 Surabaya</b> (30 Oktober 2023)</p>



**Assessment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Khadijah Surabaya**  
**(31 Oktober 2023)**

No	Instansi	Aspek	Nilai	Uraian	Rekomendasi	Nilai Akhir
1	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
2	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
3	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
4	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
5	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
6	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
7	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
8	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
9	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
10	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4

**Merekap hasil Assessment Sekolah Siaga kependudukan**  
**(01-06 November 2023)**

No	Instansi	Aspek	Nilai	Uraian	Rekomendasi	Nilai Akhir
1	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
2	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
3	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
4	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
5	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
6	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
7	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
8	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4
9	SMP KHADIJAH SURABAYA	KEBERSIHAN	4	Kebersihan lingkungan sekolah	Menjaga kebersihan lingkungan sekolah	4
10	SMP KHADIJAH SURABAYA	KESELAMATAN	4	Keamanan lingkungan sekolah	Menjaga keamanan lingkungan sekolah	4

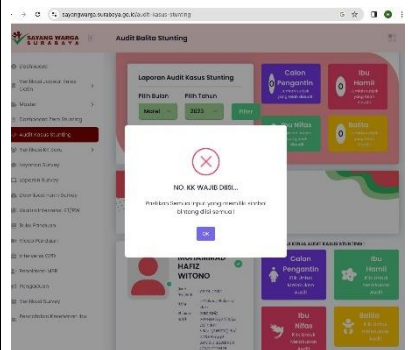
**Membuat proposal Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta matriksnya bersama kelompok masing-masing**  
**(08-10 November 2023)**







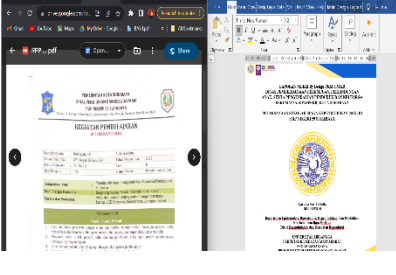
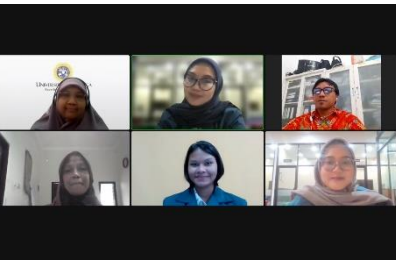
**Survei kepuasan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro**  
**(13 November 2023)**



**Bimbingan skripsi dan magang dengan Bu Nunik**  
**(14 November 2023)**



**Input data ke aplikasi "Sayang Warga"**  
**(17 November 2023)**

		
<p><b>Bimbingan Skripsi dengan Bu Nunik di FKM UNAIR</b> (17 November 2023)</p>	<p><b>Bimbingan skripsi dan magang dengan Bu Nunik</b> (20 November 2023)</p>	<p><b>Pelaksanaan sosialisasi SSK di Graha Sawunggaling, Kantor Pemerintahan Kota Surabaya</b> (27 November 2023)</p>
		
<p><b>Evaluasi pelaksanaan sosialisasi SSK</b> (29 November 2023)</p>	<p><b>Mengerjakan Laporan Magang dan Skripsi</b> (01 - 06 Desember 2023)</p>	<p><b>Seminar Hasil Magang</b> (7 Desember 2023)</p>



**Lampiran IV. Sertifikat MBKM**



The certificate is titled "SERTIFIKAT" and is issued to "KARUNIA NUR FADHILLA". It recognizes her participation in the "MAHASISWA MBKM BY DESIGN" program at the "FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT" from July to December 2023. The certificate is signed by Prof. Dr. Santi Martini, dr, M.Kes (Dean) and Dr. Muji Sulistyowati, S.KM, M.Kes (Coordinator of the S1 Public Health Program). Logos for "PUBLIC HEALTH", "SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS", "Kampus Merdeka INDONESIA JAYA", and "GO PUBLIC HEALTH" are visible at the top.

**SERTIFIKAT**  
No : 10757/UN3.FKM/PK.02/2023  
Diberikan kepada :

**KARUNIA NUR FADHILLA**

*Atas partisipasinya sebagai*  
**MAHASISWA MBKM BY DESIGN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**yang diselenggarakan pada Juli - Desember 2023**

Dekan  
Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Airlangga

Koordinator Program Studi  
S1 Kesehatan Masyarakat  
FKM UNAIR

  
Prof. Dr. Santi Martini, dr, M.Kes

  
Dr. Muji Sulistyowati, S.KM, M.Kes

**Lampiran V. Lembar Assessment SSK**

**ASSESSMENT SSK**

Nama Sekolah : .....  
 Alamat Sekolah : .....  
 No.Telepon : .....  
 Media Sosial : .....  
 Website Sekolah : .....

NO	URAIAN	STATUS		KETERANGAN
		ADA / YA	TIDAK	
1.	Sk SSK Kepala Sekolah			
2.	Pojok Kependudukan			
3.	Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK			
4.	Orientasi Penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan (jumlah guru yang terlibat)			
5.	Tersusunnya Kurikulum Materi Kependudukan dalam pembelajaran di kelas (jumlah MaPel)			
6.	Integrasi Materi Kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler/Kesiswaan			
7.	Papan Nama SSK			
8.	PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)			
9.	Kesediaan sekolah mengikuti kegiatan SSK			
10	Saran dan masukan tentang SSK			

Surabaya,.....

PETUGAS

PERWAKILAN SEKOLAH

(.....)

(.....)

*Lampiran VI. Surat Perintah Assessment*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telp. (031) 5346317 Fax. (031) 5480904

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR 400.13 /10809/436.7.8/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Jabatan : Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian  
Penduduk Dan Keluarga Berencana

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada :

*(Daftar Nama Terlampir)*

Untuk : 1.Melaksanakan Penilaian Awal (assessment) Pembentukan Sekolah Siaga  
Kependudukan pada :

Hari : Senin s/d Jum'at  
Tanggal : 23 s/d 31 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Lokasi : Terlampir

2.Melaporkan hasil-hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan.  
3.Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan  
penuh rasa tanggung jawab

Surabaya, 17 Oktober 2023



*Lampiran VII. Surat Perintah Advokasi*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telepon. (031) 5346317 Faksimile. (031) 5480904

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR 400.13 /12202/436.7.8/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada :

*(Daftar Nama Terlampir)*

Untuk : 1. Melaksanakan Advokasi Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan pada :

Hari/Tanggal : Rabu s/d Jum'at  
Tanggal : 22 s/d 23 November 2023  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Lokasi : Terlampir

2. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan sebagai bahan acuan kerja;
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 18 November 2023



*Lampiran VIII. Surat Pemberitahuan Sosialisasi*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya  
Telepon. (031) 5346317 Faksimile. (031) 5480904

Surabaya, 24 November 2023

Kepada

Yth. Ka. Dinas Pendidikan  
di -  
Surabaya

Nomor : 400.13 /12487/436.7.8/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Bantuan  
Menghadirkan Peserta  
Kegiatan Sosialisasi Sekolah  
Siaga Kependudukan (SSK)  
Tahun 2023

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2023 untuk Guru dan Siswa SMP/MTS di Kota Surabaya yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023  
Pukul : 12.30 WIB - Selesai  
Tempat : Graha Sawunggaling Lt. 6 Surabaya  
Alamat : Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menghadirkan 4 (empat) peserta dari masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah;
2. Guru Mata Pelajaran IPS/Guru Ekstrakurikuler; dan
3. Perwakilan Pengurus OSIS kelas 8 sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun daftar nama sekolah sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

